

Anthony Giddens: Antara Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga¹

Zainal Abidin Achmad

SIAPAKAH ANTHONY GIDDENS?

Anthony Giddens lahir di Edmonton, kawasan bagian utara ibukota London, pada tahun 1938. Pada saat menekuni studi di London School of Economics, tema tesisnya adalah tentang sosiologi olahraga. Tempat mengajar pertamanya adalah di University of Manchester, sebuah tempat bersejarah bagi perjalanan hidupnya karena di sana bertemu dengan sosok Nobeit Elias, seorang akademisi yang sebagian besar karyanya sangat memengaruhi banyak pengajar di King College of Cambridge dan Universitas California, Santa Barbara (Giddens, 1992). Selepas dari University of Manchester, Giddens kembali ke tempat asal pendidikannya di London School of Economics hingga mendapatkan posisi sebagai direktur.

Karena pemikiran Giddens yang cemerlang, ia mendapat penghargaan sebagai anggota kehormatan pada King College, dan mendapat gelar Profesor Sosiologi dari Cambridge University. Giddens merupakan sosok akademisi yang sangat produktif, tercatat lebih dari dua puluh buku telah diterbitkannya dalam kurun waktu dua puluh tahun. Sehingga menjadikan dirinya sebagai salah satu akademisi, pemikir, dan teoretisi terkemuka di abad 20. Ciri khas pada tulisan Giddens adalah keberhasilan dalam pengkombinasian yang sangat cermat atas pemahaman terhadap karya-karya pemikir klasik dan kecakapannya mengaitkan dengan isu-isu sosial kontemporer. Hal inilah yang menjadikan pemikirannya dianggap memiliki kepekaan terhadap zaman.

¹ Sebagian dari isi artikel ini telah diterbitkan dalam Jurnal TRANSLITERA, Vol 9 No. 2/ 2020.

Perspektif historis dan perspektif futuris yang sebenarnya merupakan dua arah perhatian berbeda, berhasil disatukan dalam sebuah gagasan pemikiran yang menyatukan pemikir klasik dengan kontemporer.

Penyatuan Giddens ke dalam sebuah projek gagasan ini meliputi berbagai identifikasi permasalahan, dengan memberikan kritik terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pemikiran klasik dengan melakukan pengembangan cara menyusun teori terhadap isu-isu yang berada dalam area abu-abu (belum jelas). Tujuannya adalah untuk menjabarkan bagaimana realitas sosial terjadi, dengan demikian realitas sosial mampu dipahami dengan pendekatan yang tidak lagi didominasi secara monolitik (Beilharz, 1991).

Pemikirannya terus mendapatkan dukungan dan pengikutnya pun semakin bertambah. Karena sebagian besar bukunya telah diterjemahkan ke dalam dua puluh dua bahasa. Uniknya, hanya ada dua buah bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, sehingga Giddens tidak terlalu dikenal di Perancis (Achmad, 2020). Padahal proyek pemikiran Giddens telah melampaui posisi tradisional antara sosiologi individualis dengan sosiologi determinis. Sedangkan pada tataran praksis, Giddens dianggap sebagai teoretis dengan gagasan sentralnya “radikalisme” yang menolak aliran tradisional sosialisme kiri dari partai buruh dan liberalisme kanan ala Thatcher (Giddens, 1994).

Sebagai direktur London School Of Economics (LSE), Anthony Giddens merupakan penulis yang sangat produktif. Tulisan karyanya sendiri ataupun berbagai artikel serta buku yang telah dieditnya, mencapai jumlah lebih dari 30 judul dan dialihbahasakan ke dalam berbagai bahasa. Akibat kiprah intelektualnya yang mengagumkan, pemikiran Giddens menumbuhkan minat banyak kalangan masyarakat untuk menupas, menelaah, dan mengkritiknya lebih jauh dari berbagai dimensi. Meskipun puluhan buku telah dihasilkan, namun untuk menelusuri jejak pemikirannya secara khusus, dapat diperoleh dari empat terbitan bukunya (Giddens, 2006).

Terbitan pertama adalah rangkaian dua buah buku yang diterbitkan oleh Giddens, berisikan kritik terhadap studi sosiologi klasik. Buku tersebut adalah *Capitalism and Modern Social Theory* (Giddens, 1971) dan *The Class Structure of the Advanced Societies* (Giddens, 1973) yang memfokuskan kritik terhadap karya-karya Durkheim, Marx, dan Weber. Terbitan kedua adalah buku yang berjudul *New Rules of Sociological Method* yang berisikan pengajuan sebuah teori yang dinamai “Teori Strukturasi”. Buku ini menjelaskan pernyataan posisi teori Anthony Giddens di antara belantara teori-teori sosial lainnya (Giddens, 1976). Selanjutnya Giddens

mengelaborasi teorinya ke dalam terbitan ketiga berupa rangkaian tiga buah buku yang diterbitkan secara beruntun, yaitu: *Central Problems in Social Theory* (Giddens, 1979), *A Contemporary Critique of Historical Materialism* (Giddens, 1981), dan *The Constitution of Society* (Giddens, 1984). Terbitan keempat adalah rangkaian dua buku yang berjudul *The Third Way* dan *Beyond Left and Right* (Achmad, 2020).

Buku *The Third Way* adalah karya paling monumental dari Anthony Giddens dan paling banyak menyedot perhatian dari akademisi dan politisi baik dalam negeri Inggris maupun dari berbagai pemimpin negara dari berbagai belahan dunia. Beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan di berbagai negara, telah menerapkan pemikiran-pemikiran Anthony Giddens dalam sebagian kebijakan politiknya. Beberapa nama pemimpin dunia tersebut, antara lain: Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Kanselir Jerman, Gerhard Schroeder (Hutton dan Giddens, 2000). Buku *Beyond Left and Right*, adalah karya tulis terpenting Anthony Giddens karena menjadi dermaga bagi berlabuhnya berbagai konsep dan pemikiran yang tertulis sebelumnya dalam buku *The Third Way*. Arah dan implementasi semua pemikiran Anthony Giddens tentang *The Third Way* tertuang secara runut dan jelas dalam buku *Beyond Left And Right*. Sehingga isi buku *Beyond Left and Right* menjadi semacam genealogi historis yang mendokumentasikan gejala paradigmatik gagasan ideologi jalan ketiga (Giddens, 1994).

Meskipun Giddens mengeklaim tentang konsistensi karyanya seputar strukturasi, namun pada sebagian besar tulisan-tulisan berikutnya, ia telah mengalihkan fokusnya dari diskusi seputar teori strukturasi. Pada karya-karya berikut ini: *The Consequences of Modernity* (Giddens, 1990), *Modernity and Self Identity* (Giddens, 1991), dan *The Transformation of Intimacy* (Giddens, 1992), banyak mengkaji perubahan karakter modernisasi di tingkat masyarakat hingga individu. Gagasan-gagasan Giddens di sini lebih banyak berkaitan dengan globalisasi dan *Risk Society* (Beck, 1992), yang lebih dalam dikupas di sumbangan tulisan pada *Reflexive Modernization* (Beck, Giddens, dan Lash, 1994), *Runaway World* (Giddens, 1999), dan *Global Capitalism* (Hutton dan Giddens, 2000). Kehebatan seorang Giddens selain melahirkan pemikiran-pemikiran fenomenal, dia melayani seluruh perdebatan luas yang tumbuh di kalangan akademisi di banyak tempat tentang teori dan pemikirannya. Pada hampir semua perdebatan ilmiah tersebut, Giddens hadir dan berpartisipasi. Perjalanan tentang bagaimana Giddens menjawab semua perdebatan, dapat diikuti dari berbagai buku berikut: *Classes, Power, and Conflict: Classical and Contemporary Debates* (Giddens dan Held, 1982), *Anthony Giddens: Consensus and Controversy* (Clark, Modgil, dan Modgil, 1990), *Giddens' Theory*

of Structuration: A Critical Appreciation (Bryant dan Jary, 1991), *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order* (Beck, Giddens, dan Lash, 1994), dan *Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity* (Giddens dan Pierson, 1998).

Keterlibatan Giddens pun meningkat menuju politik praktis, sejak diangkat sebagai penasihat pemerintah Inggris di tahun 1997. Sebagai akademisi, Giddens juga menuliskan seluruh keterlibatan politiknya dalam berbagai buku, antara lain: *Beyond Left and Right* (Giddens, 1994); *The Third Way* (Giddens, 1998); *The Third Way and its Critics* (Giddens, 2000); *Where Now for New Labour?* (Giddens, 2002); *Europe in the Global Age* (Giddens, 2007a); dan *Over to You, Mr Brown—How Labour Can Win Again* (Giddens, 2007b).

KRITIK TERHADAP SOSIALISME DAN KAPITALISME, CIKAL BAKAL TEORI STRUKTURASI

Sebagai ideologi, sosialisme, dan kapitalisme dianggap telah gagal dan tidak layak digunakan sebagai referensi. Kegagalan utama kedua ideologi tersebut adalah ketidakampuannya memberikan kepuasan dalam upaya mewujudkan sistem sosial yang berkeadilan. Giddens bahkan secara meyakinkan berpendapat bahwa kedua ideologi tersebut sudah sepiantasnya didepak dan dihapuskan dari arena politik, sosial, dan ekonomi. Dunia membutuhkan ideologi yang memiliki semangat baru, napas baru ajaran baru dan konsep kehidupan baru yang mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Sosialisme dan kapitalisme pada awal kemunculannya seolah mampu menyelesaikan berbagai persoalan dunia, namun kenyataannya mereka tidak bisa bekerja sendiri. Optimisme dua ideologi tersebut adalah dapat memberikan jawaban persoalan dunia dan mampu menjamin tatanan masyarakat masa depan yang lebih baik.

Kedua ideologi tersebut sudah kuno dan tidak antisipatif terhadap perkembangan zaman, karena masih berakar dari pemikiran para filsuf *enlightenment* yang sesuai pada konteks abad 18. Sedangkan dunia saat ini berada pada masa *radical modernity*. Pemikiran dari masa lalu tentu saja mustahil untuk mampu menjelaskan dunia modern. Pemikiran harus menyesuaikan dengan konteks zaman, pemikiran harus menjangkau dan mengatasi dunia yang sedang berada dalam proses perubahan radikal atau *radical modernity*. Giddens lebih memilih menggunakan istilah *radical modernity* daripada menggunakan istilah *post modernism* (Giddens, 1998).

Giddens mengajak para pemikir dan pemimpin dunia untuk merumuskan kembali tentang visi dan misi manusia menghadapi persoalan dunia yang seolah berubah tanpa kendali. Giddens menyarankan perlunya usaha kreatif untuk meredakan ketegangan antara ideologi kanan dengan kiri. Salah satunya dengan melupakan pembelaan terhadap kebenaran ideologi masing-masing. Hal terpenting adalah mencari solusi untuk menyusun tata dunia baru yang lebih manusiawi (Giddens, 1998).

Salah satu bagian menarik dalam pemikiran Giddens ketika memahami realitas sosial, yaitu upayanya menawarkan dan membuka ruang dialog untuk memperkaya khasanah pemikiran dunia, tidak sekadar menolak atau menerima. Sebagaimana dialog yang dilakukan Giddens ketika ia berproses mencari sintesis terhadap globalisasi. Globalisasi tidak selayaknya hanya diterima padanya, globalisasi juga layak dikritik atas dampak negatif yang ditimbulkannya. Kelemahan yang sering muncul pada pemikiran manusia adalah terjebak pada fanatisme ideologi. Padahal fokus pemikiran manusia seharusnya terbuka dan harus siap mencari jalan terbaik dan menemukan berbagai solusi alternatif terhadap kebuntuan menyelesaikan permasalahan sosial yang ada (Giddens, 1998).

Penyelesaian persoalan dunia tidak bisa hanya berkuat pada pembelaan terhadap kebenaran ideologi kanan atau kiri. Kita secara elegan harus mampu menyusun tata kehidupan masyarakat tidak dalam posisi berhadap-hadapan, tetapi selalu mencari titik temu sehingga diperoleh gagasan yang lebih segar dan konstruktif. Ideologi kiri maupun kanan secara sendirian tidak mampu menyentuh akar berbagai permasalahan sosial, seperti: perceraian, kerusakan lingkungan, homoseksual, imigran dan masalah lainnya, karena memang membutuhkan kerja sama berbagai pihak (Giddens, 1998).

Sosialisme dan kapitalisme tidak bisa lepas dari perspektif konflik, sehingga klaim kebenaran masing-masing, hanya akan mempertegas bipolaritas pandangan. Salah satunya bahwa sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap bahaya kapitalisme. Sosialisme meyakini bahwa perubahan harus dilakukan melalui konflik dengan menghancurkan kelas penindas sehingga tercipta tatanan masyarakat yang adil (Giddens dan Held, 1982). Masyarakat kapitalis menyimpan persoalan besar yang tampaknya bertambah buruk. Pasar bebas yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi di masa depan, di saat yang sama mengakibatkan tingginya kemerosotan ekonomi. Keganasan sifat yang dimiliki kapitalisme pasar bebas hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat dan gagal mendorong kolektivisme. Sistem

kapitalisme justru mengalami kegagalan di tempat lahirnya, yaitu *Western* (Adams, 2002).

Kapitalisme menumbuhkan persaingan yang tidak sehat, karena para pemilik modal dapat dengan mudah menyingkirkan kaum lemah karena keterbatasan pengetahuan, modal, dan kesempatan (Mashud, 2010). Dominasi kaum pemodal menyebabkan sistem kapitalisme rentan memunculkan ketimpangan sosial karena pertumbuhan hanya terpaku pada yang kuat (Achmad dan Alamiyah, 2015). Sistem kapitalisme mendorong produsen berusaha mencapai efisiensi setinggi mungkin dan mencapai produk sebesar-besarnya untuk bisa bertahan (Raharjo, 1999). Prinsip yang memungkinkan orang untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya bagi dirinya. Ideologi seperti ini mengabaikan campur tangan Tuhan terhadap segala aktivitas manusia (Sasono, 1998).

Kaum kapitalis mengandalkan kompetisi bebas dalam rangka mengejar dan meningkatkan kemakmuran. Kompetisi bebas menyerahkan kegiatan ekonomi pada pasar. Kekuatan pasar akan dibimbing oleh *invisible hand* yang mengarahkan perilaku produsen tentang barang apa yang seharusnya diproduksi. Pada akhirnya kekayaan yang ada pada segelintir orang akan menetes ke bawah (*trickle down*) kepada anggota masyarakat lain (Fakih, 2004).

Giddens secara tegas mengajukan argumen bahwa tetesan kemakmuran tidak akan pernah terwujud. Kesenjangan dan keserakahan yang justru muncul, dengan dampak pada tragedi kemanusiaan. Persaingan bebas malah menjadi ancaman karena mengakibatkan eksploitasi tanpa kendali. Pasar menjadi penentu dan pengendali kebutuhan manusia. Berbagai korporasi raksasa seperti Bank Dunia, IMF juga WTO seolah menjadi juru bicara dan representasi penindasan, penjajahan, dan berbagai bentuk rekolonisasi (Giddens, 1998). Kapitalisme mengalami kegagalan karena tidak mampu mengatasi *die nue unubersichtlichkeit* sebuah istilah yang dinyatakan oleh Jurgen Habermas, artinya letupan-letupan perkembangan yang disertai ketidakterdugaan (Hatta, 2000).

Akibat kebobrokan kapitalisme, G. W. F Hegel dan Karl Marx mengatakan bahwa *communisme society* merupakan puncak peradaban sebagai akibat dari kebobrokan yang tidak lagi ditolerir (Fukuyama, 1992). Sejarah filsafat adalah proses dialektik atau proses evolusi, yang menekankan bahwa tesis akan memunculkan antitesis dan pada akhirnya melahirkan sintesis. Pada gilirannya, sintesis akan menjadi tesis kembali dan timbul antitesis lalu sintesis lagi. Begitulah seterusnya yang terjadi. Tetapi ada *contradictio in terminis* dalam tesis

pemikiran ketiga, yaitu anggapan bahwa sejarah (peradaban) tidak ada lagi peradaban yang lain karena sudah mencapai puncak (berakhir) setelah ketiga puncak peradaban terwujud (Fukuyama, 1992).

Teori evolusi sosial menjelaskan bahwa “sejarah” dapat dikisahkan dalam “alur cerita” yang menciptakan gambaran kacau balau tentang berkembangnya peristiwa ke dalam urutan yang tertata. Sejarah “dimulai” dari kebudayaan berburu menuju masyarakat bercocok tanam, berlanjut menuju kebudayaan agraris dan menuju puncaknya pada kebudayaan modern di Barat. Teori ini mengalami dekonstruksi melalui pemikiran Jean-François Lyotard dan pemikir lain beraliran postmodern. Sejarah tidak memiliki bentuk menyeluruh, karena sejarah tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang mencerminkan transformasi (Giddens, 1990).

Sejarah menurut Giddens bukan sebuah urutan peristiwa yang linier ataupun siklus yang berayun seolah pendulum. Sejarah diibaratkan sebagaimana sekumpulan orang mabuk. Manusia berada dalam kondisi hidup seperti berjalan terhuyung ke kiri dan ke kanan dan bergerak saling silang untuk memburu utopia. Utopia adalah sebuah kondisi yang diidamkan, sebagai kebalikan dari kondisi yang menyengsarakan. Sebuah kondisi yang diharapkan lebih baik daripada kondisi kehidupan yang sedang dijalani saat ini. Cara terbaik dan agung untuk mewujudkan utopia adalah politik (Giddens, 1995). Sebagaimana Giddens yang tidak bersetuju pada pemikiran Marx dan pengikutnya bahwa segala persoalan kejahatan di dunia disebabkan oleh pertentangan kelas antara kapitalis dengan proletar. Kaum kapitalis sebenarnya memang menyengsarakan kaum buruh, tetapi Giddens ragu bahwa kondisi ini serta merta menjadi penyebab timbulnya perlawanan dari para pembela kelestarian alam, pembela hak asasi, pembela perdamaian, dan pembela demokrasi. Giddens menghadirkan negara sebagai entitas yang mempunyai kepentingan otonom dari para kapitalis, dalam menjalankan pengawasan dan penjagaan kondisi tersebut (Giddens, 1998).

Dunia membutuhkan gerakan radikalisme politik sebagaimana gagasan Giddens, artinya gerakan untuk melepaskan diri dari cengkraman masa lalu. Radikalisme politik bukanlah revolusi sebagaimana dimaknai oleh ide sosialisme. Makna radikalisme politik adalah pada semangat progresivitasnya bukan menghancurkan tatanan yang ada. Sejarah harus dikuasai untuk kepentingan manusia, keuntungan-keuntungan materialisme dan kapital yang dianggap sebagai pemberian Tuhan bagi segelintir orang, harus dikembangkan dan diatur untuk kemanfaatan dan kesejahteraan bersama (Giddens,

2000). Radikalisme bukan sekadar menggulirkan perubahan tetapi turut mengendalikan perubahan sehingga dapat menggiring sejarah menuju masa depan. Banyak bukti yang menunjukkan kegagalan negara karena terlalu besar perannya mengintervensi pasar. Atau peran negara menjadi tidak ada (Mashud, 2001). Bukan berarti kita serahkan sepenuhnya keadilan kepada pasar dan menganggap kapitalisme dalam bentuk neoliberalisme dapat mengatasi persoalan (Giddens, 1998).

Posisi peran negara menurut Giddens, tidak boleh terlalu dominan terhadap pasar, tetapi negara harus fleksibel untuk mengakomodasi kepentingan investor dalam kerangka untuk bersama mendapatkan keuntungan. Kesediaan bekerja sama bukanlah sebuah ancaman melainkan solusi untuk mendapatkan hasil terbaik, daripada saling berposisi sebagai lawan antara kepentingan negara dengan kepentingan investor (Giddens, 2000).

Jalan ketiga merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Sosialisme adalah perwujudan ketidakpuasan terhadap kesenjangan dalam masalah pendapatan akibat kegilaan kapitalisme. Tetapi kita perlu memahami pemikiran sosialisme dan kapitalisme sebagai sebuah perspektif untuk memahami sekaligus menjelaskan realitas sosial ekonomi politik yang ada (McClelland, 2005). Apabila kita menggunakan satu pemikiran saja, maka kita akan terjebak pada nasionalisme yang sempit, fanatisme berlebihan dan mempertegas pembagian blok dunia yang berujung pada meningkatnya ketegangan dunia (Giddens, 1994).

DEMOKRASI DAN JALAN KETIGA

Ketegangan dunia akibat bipolaritas antara praktik sosialisme dan kapitalisme, melahirkan paradigma ideologi tengah yang diberi nama "Jalan Ketiga" (*The Third Way*). Ideologi yang dilahirkan oleh Anthony Giddens ini merupakan ideologi alternatif yang berusaha menjawab persoalan kemanusiaan yang seharusnya menjadi tujuan utama dari kehadiran sebuah ideologi (Giddens, 1998). Ideologi Jalan Ketiga lahir dengan mengusung semangat kemanusiaan, merupakan wacana politik global yang menjadi respons atas janji muluk penciptaan masa depan manusia yang diberikan oleh ideologi sosialisme dan kapitalisme. Kegagalan sosialisme dan keangkuhan kapitalisme yang berkembang dalam kerja politik dunia, justru saling menjatuhkan dan berujung pada pudarnya nilai-nilai kemanusiaan di genggaman tangan kaum borjuis dan proletar (Giddens, 1994).

Jalan Ketiga mengajak kita untuk melampaui ideologi kiri atau kanan, berdasarkan asumsi bahwa keduanya telah mengalami kegagalan untuk membawa peradaban dunia menuju kedamaian dan keharmonisan. Kedamaian dan keharmonisan adalah ruh dari seluruh ideologi apapun di dunia. Sosialisme dan kapitalisme perlu dipinggirkan sebagai titik tolak dalam pembangunan peradaban dunia yang lebih akomodatif terhadap tujuan kemanusiaan sebuah ideologi. Jalan Ketiga menunjukkan keberpihakan dan semangat Giddens terhadap humanisme sebagai jantung beroperasinya pembangunan tata dunia baru bagi terciptanya masa depan kehidupan manusia yang berkeadilan (Giddens, 1994).

Sejak saat itulah, Jalan Ketiga dimanifestasikan ke dalam berbagai kebijakan politik beberapa negara. Sebagaimana kumpulan hasil survei dalam buku berjudul *New Times: The changing face of politics in 1990s* menunjukkan bahwa pengaruh ideologi kanan dan kiri semakin menurun secara signifikan (Hall dan Jacques, 1990). Beberapa negara industri di dunia telah mempraktikkan budaya politik baru Jalan Ketiga sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Manifestasi kebijakan politik ini berbeda dengan model politik tradisional yang mengandalkan sosialisme dan kapitalisme (Giddens, 2000). Kumpulan penelitian pada tahun 1990, menjadi landasan bagi prediksi Stuart Hall tentang lahirnya sebuah Masa Baru (*New Times*), yaitu transformasi politik sosialis. Indikasi lahirnya *New Times* adalah bergesernya produksi industri ke teknologi informasi, melemahnya pertentangan seksualitas, kaburnya batasan gaya hidup dan melemahnya peran politik kelas (Giddens, 2000).

Sebagaimana diakui Giddens bahwa pemikiran Jalan Ketiga sejalan dengan harapan Carol C. Gould untuk memperluas praktik teori demokrasi tidak hanya di ranah politik melainkan ke ranah ekonomi dan sosial (Gould, 1990). Jalan Ketiga sebagai kerangka kerja untuk membangun sosial demokrasi, bukan sekadar mencari kelemahan sosialisme dan kapitalisme, melainkan mengaktualisasikan ke dalam dunia kontemporer dipenuhi ketidakpastian (Giddens, 2000). Kelahiran Jalan Ketiga adalah harapan yang muncul akibat empat turbulensi dunia di akhir abad ke-20. *Pertama*, sosialisme mengalami mati suri di Eropa Timur sejak revolusi 1989. *Kedua*, globalisasi yang mendominasi dunia sejak rezim Ronald Reagan (AS) dan Margaret Thatcher (Inggris). *Ketiga*, kebijakan ekonomi neoliberal mulai ditinggalkan sejak krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997. *Keempat*, demokrasi sosial yang berkembang di Eropa Barat dalam rentang waktu 1990 hingga 2000 (Hutton dan Giddens, 2000).

Jalan Ketiga menyerukan reformasi politik pada dua aspek, yaitu (1) penciptaan kebaikan bersama (*common good*) melalui pembaruan etos dan praksis politik; dan (2) negara bangsa perlu ditata ulang (*reconstruction*) sebagai sebuah komunitas (Giddens, 2000). Kebaikan bersama tidak mungkin tercipta tanpa *virtus*: keadilan, keberanian, kebajikan, dan solidaritas. Gagasan Jalan Ketiga adalah upaya menyeru manusia untuk kembali pada nilai-nilai universalisme tentang kepedulian nasib sesama manusia. Peran negara dalam manifestasi Jalan Ketiga haruslah lincah menjalankan developmentalisme dan tidak menciptakan berbagai regulasi yang mematikan kreativitas warga negara. Peran negara tidak boleh terlalu besar karena dapat mempersempit ruang publik, menjadikan masyarakat semakin pasif, dan ide-ide pembangunan negara menjadi tidak terkomunikasikan dengan baik. Jalan Ketiga memiliki kepentingan dengan memangkas rantai birokrasi yang terlalu mengikat secara formal (Giddens, 1998).

Jalan Ketiga merupakan respons terhadap globalisasi, perkembangan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, masalah ekologis relasi manusia dengan alam, dengan membangun kembali solidaritas sosial dan memperkuat nilai-nilai kosmopolitan dengan mendasarkan pada tujuan luhur ideologi. Sikap ini disebut sebagai konservatisme filosofis (Giddens, 2000). Ideologi politik menjadi acuan untuk merespons dunia, pada saat dunia mengalami berbagai transformasi. Kemajuan ilmu pengetahuan mengubah kehidupan alamiah, sedangkan tradisi dan kebiasaan semakin luntur.

Untuk saat ini, demokrasi diakui sebagai sebuah sistem politik dunia yang menjamin terwujudnya relasi yang bebas dan setara: (1) demokrasi dapat mengembangkan potensi-potensi dan ekspresi beragam kualitas orang. Setiap individu menghargai kapabilitas orang lain. (2) Demokrasi menjamin perlindungan warga negara dari kesewenangan dan penindasan oleh otoritas politik dan kekuasaan. Keputusan politik harus melalui negosiasi dengan warga negara yang terdampak akibat keputusan tersebut. (3) Demokrasi menghargai keterlibatan individu dalam penentuan syarat atau aturan komunitas. Dalam konteks ini, individu-individu “dipaksa” untuk sanggup menerima karakter asli dan pendapat rasional orang lain. (4) Demokrasi menjamin perluasan kesempatan ekonomi (individu, kelompok, perusahaan) untuk mengembangkan sumber daya yang ada (Giddens dan Held, 1982).

Secara singkat Giddens menyatakan bahwa demokrasi menjamin otonomi, yaitu setiap individu mendapat kepastian untuk refleksi diri dalam melakukan *self determination*. Individu dapat menilai,

memperhitungkan, memilih, menimbang dan bertindak secara otonom. Praktik otonomi tidak dapat berkembang, apabila masih berlaku kepemilikan dan tradisi istimewa dalam hal hak dan kewajiban politik (Giddens, 1992). Demokrasi membuka kesempatan diskusi, mediasi, negosiasi dan kompromi terhadap berbagai perbedaan argumen untuk menetapkan keputusan politik untuk tatanan yang lebih baik. Salah satunya diperlukan institusi yang menjadi representasi warga negara yang memungkinkan publik memberikan andil bagi penentuan kebijakan (Giddens dan Held, 1982). Demokrasi tidak berdasarkan pada primordialisme, suku, agama, dan ras kelompok. Demokrasi menjadi dasar perwujudan tatanan masyarakat madani yang menyediakan mekanisme penyelesaian konflik melalui wacana universal dalam relasi kesederajatan, termasuk di dalamnya adanya pengakuan hak asasi manusia. Beberapa hak asasi yang dijamin oleh demokrasi adalah kebebasan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, serta kebebasan pers (Achmad, 2014).

Pengembangan demokrasi perlu memahami struktur masyarakat modern yang berlangsung saat ini, senyampang turut berpartisipasi dalam berbagai transformasi yang sedang berkembang. Refleksi atas kondisi manusia dalam masyarakat modern menjadi penekanan Giddens. Modernitas sebaiknya tidak dilihat semata dari logika tunggal, sebagaimana logika politik, kapital atau multikultural. Tidak seperti Marx memahami modernitas melalui kapital, Weber logika rasionalisasi, Durkheim melalui interaksi sosial. Ketika manusia memikirkan dunia modern, setidaknya mempersiapkan diri untuk mengartikulasikan logika sebagaimana susunan atap genteng (*imbriguees*). Masyarakat modern bukanlah sebuah sistem integral yang bergerak karena satu sistem tunggal dan tidak membentuk satu kebersamaan tunggal. Memahami masyarakat modern melibatkan sejumlah logika dan interferensi berbagai tren. Modernitas memiliki sifat multidimensional (Giddens, 1990).

Giddens mengajak kita untuk berpikir luas dan bervisi global sehingga dapat menangkap persepsi sesungguhnya. Manusia saat ini hidup pada zaman yang “meradikalisasi” modernitas (Giddens, 1990, 1991). Masyarakat yang mendunia mendorong modernitas seperti “mesin gila” yang berjalan tanpa kendali manusia. Diperlukan kesadaran kolektif untuk dapat mengemudikan perubahan dan membatasinya, bahkan sanggup mengontrol pasar bebas. Perubahan visi inilah yang menjadi *manifesto* Giddens yang dinamai *The Third Way* sebagai kerangka untuk memahami dan mengantisipasi dampak negatif modernitas.

METODE, AGENDA, DAN STRATEGI POLITIK JALAN KETIGA

Terdapat enam kerangka ideologi Jalan Ketiga sebagai metode kerja radikalisme politik yang berusaha dibentuk kembali berdasarkan konservatisme filosofis. Pada sebagian hal, beberapa nilai inti yang ada, mempertahankan sebagian pemikiran sosialis.

1. Memiliki keniscayaan untuk peduli dalam perbaikan solidaritas sosial yang mengalami kehancuran (*damaged solidarity*). Untuk itu diperlukan pelestarian beberapa nilai tradisi secara selektif, terkadang pelestarian tradisi tersebut menggunakan istilah atau penamaan yang baru. Dalil kepedulian ini menjadi kerangka kerja bersama yang diterapkan pada setiap aksi. Bukan saja kerja di tingkat individual, komunitas, dan negara melainkan juga pada aksi kerja pada sistem global.
2. Menyatakan pengakuan terhadap pentingnya politik kehidupan (*life politics*) dalam tatanan formal. Mempertahankan politik emansipatoris yang diadopsi dari ideologi politik kiri, yang menjamin kebebasan dari cengkeraman tradisi arbiter, kekuasaan arbiter, dan tekanan deprivation material. Politik emansipatoris menyediakan politik kesempatan hidup (*politic of life chance*) untuk menuju terciptanya otonomi aksi.
3. Memiliki tanggung jawab menghadirkan konsepsi politik generatif, akibat meningkatnya refleksivitas sosial. Politik generatif menghubungkan negara dengan mobilisasi refleksif masyarakat untuk berada dalam ruang yang sama. Serta memungkinkan upaya mewujudkan berbagai harapan individu dan kelompok menjadi kenyataan (*make things happen*), bukan sekadar menerima kenyataan (*have things happen*) dalam konteks tujuan sosial.
4. Perlunya membentuk demokrasi radikal yang bersifat dialogis, sebagai akibat dari munculnya berbagai kelemahan demokrasi liberal dalam tatanan sosial sebagai refleksi dunia global. Sifat dialogis dalam demokrasi merupakan solusi penyelesaian melalui cara damai untuk menyelesaikan masalah daripada melalui cara kekerasan. Semakin meluasnya praktisi demokrasi dialogis dapat mendorong proses pendemokrasian demokrasi, salah satunya dengan transparansi pengelolaan pemerintahan secara lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Memiliki kesediaan untuk memikirkan terwujudnya negara sejahtera (*welfare state*) secara lebih fundamental, akibat semakin meluasnya kemiskinan global.

6. Program politik radikal harus bersiap menghadapi peran kekerasan dalam penyelesaian masalah kemanusiaan, melalui tindakan dialog sebagai pengganti kekerasan (Giddens, 1994).

Giddens sangat memperhatikan pentingnya perjuangan mewujudkan masyarakat madani, karena masyarakat madani bukanlah kondisi yang tercipta begitu saja, *taken for granted*. Masyarakat madani dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan perjuangan yang berlangsung secara terus menerus. Kondisi prasyarat yang harus ada untuk mewujudkan masyarakat madani adalah keberadaan pemerintahan yang demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan mampu menjunjung nilai-nilai *civil responsibility*, *civil security*, dan *civil resilience* (Giddens, 1994). Pemerintah memberikan peluang seluasnya bagi kreativitas warga negaranya untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan di wilayahnya.

Jalan Ketiga memiliki agenda untuk mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan. Agenda ini dijadikan pedoman oleh *community workers* dalam menjalankan misi dan aksinya di tengah masyarakat. Secara garis besar Jalan Ketiga memiliki dua agenda, yaitu: (1) berjuang untuk mewujudkan persamaan, perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah, mendorong kebebasan sebagai otonomi, tidak ada pengakuan hak tanpa tanggung jawab, tidak ada penghormatan terhadap otoritas tanpa demokrasi, menjamin pluralisme kosmopolitan, dan meneguhkan konservatisme filosofis. (2) Mewujudkan negara demokratis baru, yaitu negara tanpa musuh, sistem ekonomi campuran yang baru, demokrasi dialogis dan kekeluargaan, masyarakat madani yang aktif, kesetaraan dan kesejahteraan sebagai inklusivitas, bangsa yang kosmopolitan dan negara yang berinvestasi sosial (Giddens, 1998).

Strategi menjalankan politik Jalan Ketiga meliputi empat hal, yaitu: (1) membantu masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintah melalui program-program peningkatan investasi sosial dan distribusi berbagai layanan sosial dasar secara adil dan meluas. (2) Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui desentralisasi pembuatan kebijakan dan peningkatan berbagai program sosial yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kepentingannya. (3) Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, serta penguatan struktur hukum lembaga swadaya masyarakat. (4) Tidak abai terhadap wilayah publik dengan menawarkan untuk rekonstruksi dan pembaruan institusi publik. Politik Jalan Ketiga menekankan peran aktif negara dan wilayah publik (Giddens, 1998).

Keberadaan negara adalah memainkan peran mendasar dalam wilayah ekonomi sebagaimana negara berperan dalam wilayah selain ekonomi. Negara tidak menggantikan struktur masyarakat madani dan pasar, tetapi negara diperlukan untuk mengintervensi keduanya. Pemerintahan dalam sebuah negara harus menciptakan stabilitas ekonomi, mengembangkan infrastruktur, memperluas investasi pendidikan, membangun sistem kesejahteraan yang kuat, mengendalikan atau mengurangi jarak ketidaksetaraan (Giddens, 2000). Tiga kunci kekuasaan, yaitu pemerintah, kekuatan ekonomi, dan kekuatan masyarakat madani, perlu dibatasi kepentingan untuk lebih melayani kepentingan solidaritas sosial dan keadilan sosial. Sebuah tatanan demokratis yang lebih menjanjikan, karena efektivitas pasar tergantung pada kekuatan masyarakat madani.

STRUKTURASI DAN STRUKTURALISME

Teori strukturasi Anthony Giddens melibatkan identifikasi hubungan antara individu dan kekuatan sosial yang bertindak atas manusia. Teori ini mencoba menyeimbangkan peran yang dimainkan para aktor dengan pilihan posisi mereka yang terbatas dalam sejarah dan dalam tatanan sosial yang mereka miliki. Di satu sisi, manusia memiliki pengetahuan yang dibatasi dan tidak memiliki seluruh preferensi atas tindakannya. Pada sisi yang lain, manusia adalah elemen yang menciptakan kembali struktur sosial dan menghasilkan perubahan sosial (Giddens, 1984; Craib, 1992). Teori ini membuktikan keberadaan dualitas manusia antara struktur dan agensi ini daripada menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan atau memperkuat keberadaannya.

Giddens menjelaskan bahwa struktur dan agensi tidak dapat dipisahkan; bahwa mereka terhubung satu sama lain sebagai 'dualitas struktur'. Aktor manusia adalah elemen yang memungkinkan penciptaan struktur masyarakat dengan cara menciptakan nilai-nilai, norma atau diperkuat melalui penerimaan sosial. Namun, pada saat yang sama orang dibatasi oleh struktur sosial. Seseorang tidak dapat memilih siapa orang tuanya dan waktu kelahirannya. Giddens menggambarkan struktur sebagai modalitas, yaitu seperangkat aturan dan sumber daya yang melibatkan tindakan manusia. Aturan berfungsi membatasi tindakan manusia, tetapi sumber daya memfasilitasi tindakan manusia (Giddens, 1984; Whittington, 2015).

Strukturasi adalah proses sistem mereproduksi struktur; sistem interaksi ada sebagai hasil dari struktur yang digunakan. Hubungan

ini disebut sebagai aturan dan sumber daya yang dibentuk oleh struktur yang memfasilitasi dan mereproduksi interaksi sosial. Giddens merekomendasikan bahwa struktur (tradisi, institusi, kode moral, dan perangkat harapan) stabil secara universal, namun demikian, dapat diubah terutama selama konsekuensi tindakan yang tidak disengaja. Misalnya, ketika manusia meninggalkan norma sosial, manusia akan mengganti atau mereproduksi norma sosial lainnya dengan cara yang berbeda (Giddens, 1984).

JENIS STRUKTUR: SIGNIFIKASI, LEGITIMASI, DOMINASI

Giddens mengidentifikasi tiga jenis struktur dalam sistem sosial: signifikasi, legitimasi, dan dominasi. Dalam model stratifikasi struktur, Giddens berusaha untuk menggambarkan hubungan antara struktur dan sistem interaksi (Craib, 1992). Jenis struktur pertama adalah signifikasi yang menghasilkan makna melalui jaringan bahasa yang terorganisir (kode semantik, skema interpretatif, dan praktik diskursif). Giddens memperluas peran aktor untuk dapat menafsirkan dan memanipulasi bahasa terstruktur dengan makna interpretatif (Cloke, Philo, dan Sadler, 1991). Struktur kedua adalah legitimasi, yaitu tatanan moral berupa norma, nilai, dan standar sosial. Ketika agen individu berinteraksi, mereka menunjukkan makna secara sadar, bawah sadar, atau tidak sadar dari tingkah laku mereka. Berinteraksi dengan cara ini membentuk norma sosial saat ini dan menimbang aturan moral struktur. Apakah suatu tindakan agen dianggap sah atau tidak dalam tatanan sosial, ditentukan oleh struktur legitimasi ini. Struktur ketiga adalah dominasi, yang berfokus pada produksi (dan pelaksanaan) kekuasaan, yang berasal dari kontrol sumber daya. Giddens mengidentifikasi bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan.

Sebagaimana Marx, Giddens juga percaya bahwa sumber daya adalah kendaraan untuk kekuasaan. Marx lebih tertarik pada hubungan antara 'alat produksi' dalam masyarakat kapitalis. Sedangkan Giddens memahami hubungan kekuasaan sebagai bentuk interaksi antara aktor dan struktur. Dalam interaksi ini, sumber daya dapat digunakan sebagai bentuk otoritas yang diilustrasikan oleh hubungan bos dan karyawan. Sumber daya juga dapat digunakan dalam bentuk properti seperti alokasi kekayaan atau properti.

AGENSI

Tindakan dasar manusia dan kegiatan yang dihasilkan, merupakan dua kemampuan yang menentukan manusia sebagai 'Agensi'. Giddens membedakan antara tindakan sebagai perkembangan aksi yang terpisah dan aksi sebagai keterlibatan rendah yang berkelanjutan oleh agen manusia yang berbeda dan otonom (Cloke, Philo, dan Sadler, 1991). Tindakan individu dapat dirangsang oleh keinginan menyelidiki tindakan sendiri atau proses pemeriksaan diri yang disebut sebagai pemantauan refleksif (Giddens, 1984). Model tindakan Giddens memiliki tiga elemen, yaitu pemantauan refleksif, rasionalisasi, dan motivasi. Setiap elemen memiliki peran spesifik dalam keseluruhan proses aksi. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agensi adalah elemen mendasar untuk menciptakan segala macam perubahan. Perubahan dapat dianggap sesederhana gerakan melalui ruang untuk berinteraksi dengan lingkungan baru, perubahan atau kompleksitas interaksi.

MIKRO VERSUS MAKRO

Struktur sangat penting untuk topik tingkat mikro dan makro. Mengambil contoh yang digunakan sebelumnya tentang pembatasan pilihan orang tua seseorang. Pada tingkat mikro, manusia tidak dapat memilih orang tua. Tetapi pada tingkat makro, manusia memiliki pilihan untuk mempunyai anak. Hubungan yang dibuat individu berada dalam interaksi konstan dan dikendalikan oleh individu itu sendiri. Di sisi lain, individu tidak mampu mengorganisir sebagai masyarakat, tanpa keberadaan organisasi sosial dan negara. Pada tingkat makro ini kita disatukan oleh pola bertahan hidup bersama yang disusun oleh seperangkat standar yang ditentukan seperti hukum negara. Kedua perspektif itu tidak bisa dipisahkan; jika tidak, akan sulit untuk memahami mereka secara terpisah. Ikatan bersama antara individu dan kekuatan eksterior ini menyatukan teori Strukturalisasi Giddens.

KRITIK ATAS TEORI STRUKTURASI

Memang benar bahwa teori strukturasi banyak dikritik, karena memang memiliki bobot pemikiran yang luar biasa dalam sosiologi modern (Meštrović, 1998). Sebagai bentuk dukungan dan penghargaannya pada sosok Anthony Giddens dan pemikirannya, Meštrović menulis sebuah buku berjudul *Anthony Giddens The Last Modernist* yang khusus mengupas

teorinya. Kontribusi Giddens dinilai sangat berbeda. Banyak memberikan pandangan dengan berbagi kegunaan teori dan kekayaan analisisnya, disertai penyebutan berbagai manfaat yang ditawarkan. Berbagai kritik yang dialamatkan kepada pemikiran Giddens, dijawabnya melalui berbagai artikel ilmiah baik berupa buku, jurnal maupun konferensi.

Beberapa kritik yang langsung dijawab antara lain: tentang penyatuan agen dan struktur (konseptualisasi agensi pada kesadaran praktis), konseptualisasi struktur dan komponen-komponennya (seperti aturan, norma, regulasi), dimensi ruang-waktu (kurangnya konseptualisasi ruang), orientasi ontologis (seperti penolakan fungsionalisme, konseptualisasi teori), dan kurangnya pedoman empiris. Kritik-kritik tersebut dijawab bukan hanya oleh Giddens sendiri, tetapi oleh banyak akademisi lain yang mendukung pemikiran Giddens. Jawaban atas semua kritik, dilakukan dengan mendasarkan pada kegunaan teori strukturasi. Berikut ini, ringkasan dari kontribusi pemikiran para akademisi yang menjawab kritik-kritik tersebut.

Kritik pertama yang patut diperhatikan tentang konsep-konsep utama: agen dan struktur. Giddens mengatakan bahwa dia tidak setuju apabila agen dan struktur tersebut terpisah. Alasan utamanya bahwa struktur hanya berlaku independen dari agen apabila dalam institusinya melampaui dimensi ruang-waktu. Struktur tidak sama dengan sistem sosial. Struktur ini tidak sesederhana dimaknai sebagai kehadiran nyata seperti halnya sifat struktural dalam sistem sosial. Giddens menegaskan bahwa sifat struktur adalah virtual. Tidak berwujud meskipun secara definitif bentuknya ada. Kekeliruan para pengkritik adalah menyematkan label "struktur sosial" pada kata struktur yang digagas Giddens, sehingga para pengkritik berpikir bahwa struktur itu melampaui agen manusia. Sebagai konsekuensinya, Giddens bersepakat bahwa struktur dan agen adalah sebuah kesatuan (dualitas). Tentu berbeda apabila membawa konsepsi agen dan struktur kepada pembicaraan tentang sistem sosial (Giddens, 1989).

Kritik kedua adalah tentang konseptualisasi aturan. Giddens menegaskan bahwa perbedaan pemahaman tentang "*rules*" lebih banyak memperlumahkan tentang formulasi daripada masalah definisi. Pada titik ini, Giddens menyatakan bahwa hanya dialah orang pertama yang mengakui bahwa ungkapan ide-idenya tidak selalu lebih daripada tindakannya. Argumen Giddens tentang formulasi *rules* adalah secara matematis disebutkan bahwa *rules* yang dimaksud adalah sebagaimana prosedur atau konvensi yang dapat digeneralisasikan (Thompson, 1989).

Konseptualisasi agen dan struktur sesungguhnya adalah teori yang menarik karena mengekspresikan pemahaman yang mendalam tentang

refleksivitas dari fenomena agen manusia yang berpengetahuan; karena refleksivitas ini mengarah pada reproduksi sistem sosial di bawah interaksi dengan struktur. Teori ini kuat dan menarik karena mengungkapkan pemahaman yang mendalam tentang apa kita sebagai agen manusia berpengetahuan reflektif yang selalu dikondisikan oleh dan reproduksi struktur sosial secara terus menerus (Bernstein, 1986). Sorotan Giddens adalah tentang keterbatasan agen manusia untuk mengendalikan nasib mereka, ketika ia menolak ilusi kontrol sukarela karena logika sejarah.

Kritik ketiga tentang kurangnya konseptualisasi ruang-waktu. Giddens menyatakan ketidaksetujuannya bahwa pendekatan Heidegger merupakan dasar dari konseptualisasi ruang waktu sebagai dua hal yang terpisah. Justru diasumsikan bahwa waktu dan ruang tidak dapat dipisahkan. Ketika berbicara tentang waktu, kita berbicara secara implisit tentang ruang dan sebaliknya, terlebih apabila kita menyajikan dan menjelaskan konteks interaksi sosial (Giddens, 1989).

Selanjutnya Giddens menyatakan dunia modern dicirikan oleh sejumlah besar informasi yang memengaruhi kontrol tindakan secara reflektif. Karenanya, rutinitas tidak mengganggu kekuatan dan kebebasan agensi. Sebaliknya, dunia modern menawarkan lebih banyak pilihan kepada individu. Gagasan ini berasal dari jawaban tentang sifat rapuhnya ontologis keamanan sosial. Giddens tidak berasumsi bahwa motivasi hanya ada pada tingkat ketidaksadaran tidak dianggap karena agen memiliki keinginan dan motivasi kesadaran. Akibatnya, motivasi dapat memengaruhi secara langsung (Giddens, 1990).

RINGKASAN

Tujuan utama politik Jalan Ketiga merupakan upaya kesepahaman bersama dalam rangka mencari solusi alternatif dari pada sekadar mempertentangkan antara sosialisme dengan kapitalisme. Politik Jalan Ketiga mengunggulkan kepeduliannya pada keadilan sosial dan mendefinisikan ulang kebaikan bersama yang menekankan dua semboyan, yaitu: ketiadaan hak tanpa tanggung jawab dan tidak ada otoritas tanpa demokrasi. Jalan ketiga adalah cara efektif untuk mewujudkan keadilan dan solidaritas sosial karena mampu mengembangkan dan memadukan kekuatan berbagai program politik. Jalan Ketiga mampu menghadapi ketidaksetaraan dan kekuatan perusahaan dalam dunia kontemporer.

Ideologi Jalan Ketiga dapat menumbuhkan bentuk masyarakat beragam dengan dasar nilai-nilai egalitarian. Politik Jalan Ketiga

menjamin kesempatan yang sama dalam memperoleh pendapatan meskipun besarnya berbeda, tetapi sangat peduli terhadap ketidaksamaan penghasilan. Membatasi kemungkinan timbulnya ketidaksetaraan kekayaan dan keuntungan, karena dapat merampas kesempatan generasi berikutnya.

Dualitas agensi dan struktur sangat penting untuk memahami kompleksitas yang ada dalam hubungan antara keduanya. Agensi yang berpengetahuan dapat menyimpulkan dari pengalaman lokasi mereka dalam struktur. Kebebasan yang dimiliki suatu agensi dalam lingkungannya bergantung pada konteks agensi tersebut diamati. Agensi memiliki peran penting dalam mengubah struktur ketika terkait perubahan norma, regulasi, dan kebijakan. Memahami dualitas dapat secara mudah dengan mengajukan pertanyaan, kapan dan bagaimana perubahan oleh agensi dianggap cukup signifikan untuk mengubah struktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad ZA. 2014. *Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia*. Edisi ke 2. Surabaya: Lutfansah.
- Achmad ZA. 2020. Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 9(2):45–62.
- Achmad ZA and Alamiyah SS. 2015. Relation Between Political Economic of Media with the Strategies for Radio Positioning to Maintain the Existence of Commercial Radio (Case Study of JJFM Radio in Surabaya). In *International Conference on Democracy and Accountability (ICoDA)*. Surabaya: Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga, pp. 188–193.
- Adams I. 2002. *Political Ideology Today*. 2nd Edn. Manchester: Manchester University Press.
- Beck U. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: SAGE Publications Ltd.
- Beck U, Giddens A, and Lash S. 1994. *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Beilharz P. 1991. *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*. St Leonards, NSW: Allen & Unwin.
- Bernstein RJ. 1986. Structuration as Critical Theory. *A Philosophical Journal*, 6(2):235–249.

- Bryant CGA and Jary D (Eds). 1991. *Giddens' Theory of Structuration: A Critical Appreciation*. London and New York: Routledge.
- Clark J, Modgil C, and Modgil S. 1990. *Anthony Giddens: Consensus and Controversy. Consensus*. London: Falmer Press.
- Cloke P, Philo C, and Sadler D. 1991. *Approaching Human Geography: an Introduction to Contemporary Theoretical Debates*. London: Paul Chapman.
- Craib I. 1992. *Anthony Giddens*. London: Routledge.
- Fakih M. 2004. 'Neoliberalisme dan Globalisasi', *Al-Manär: Ekonomi Politik Digital Journal*, 1(1):1-12. Available at: <https://mirror.unpad.ac.id/orari/library/cd-al-manaar-digilib/bahan/8>. EKONOMI POLITIK/3. Neoliberalisme dan Globalisasi.pdf.
- Fukuyama F. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: The Free Press.
- Giddens A. 1971. *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Giddens A. 1973. *The Class Structure of the Advanced Societies*. London: Hutchinson University Library.
- Giddens A. 1976. *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. 2nd Edn. Cambridge, UK: Polity Press.
- Giddens A. 1979. *Central Problems in Social Theory: Action, structure and contradiction in social analysis*. Basingstoke: Palgrave.
- Giddens A. 1981. *A Contemporary Critique of Historical Materialism: Vol. 1 Power, property and the state*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Giddens A. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge, Massachusetts: Polity Press.
- Giddens A. 1989. A Reply to my Critics. In Held D and Thompson JB (Eds). *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Giddens A. 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Giddens A. 1992. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Giddens A. 1994. *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, Journal of Chemical Information and Modeling*. Cambridge, UK: Polity Press.

- Giddens A. 1995. *Politics, Sociology and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Giddens A. 1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Giddens A. 1999. *Runaway World: How Globalisation is Reshaping our Lives*. London: Profile Books.
- Giddens A. 2000. *The Third Way and its Critics*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Giddens A. 2002. *Where Now for New Labour?*. Cambridge: Polity.
- Giddens A. 2006. *Sociology*. 5th Edn. Cambridge, UK: Polity Press.
- Giddens A. 2007a. *Europe in the Global Age*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens A. 2007b. *Over to You, Mr Brown—How Labour Can Win Again*. Cambridge: Polity.
- Giddens A and Held D (Eds). 1982. *Classes, Power, and Conflict: Classical and Contemporary Debates*. London and Basingtoke: Macmillan Education.
- Giddens A and Pierson C. 1998. *Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Gould CC. 1990. *Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hall S and Jacques M (Eds). 1990. *New Times: The Changing Face of Politics in 1990s*. London: Lawrence & Wishart.
- Hatta M. 2000. *Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hutton W and Giddens A (Eds). 2000. *Global Capitalism*. New York: The New Press.
- Mashud M. 2001. Analisis Politik Ekonomi Petani Dalam Struktur Hubungan antara Negara dan Pasar. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, XIV(4):77-88.
- Mashud M. 2010. *Sosiologi Pembangunan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Tersedia pada: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI4411-M1.pdf>.
- McClelland JS. 2005. *A History of Western Political Thought, A History of Western Political Thought*. London and New York: Routledge. doi: 10.4324/9780203980743.
- Meštrović SG. 1998. *Anthony Giddens: The Last Modernist*. London and New York: Routledge.
- Raharjo D. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sasono A. 1998. *Solusi Islam Atas Problem Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Thompson JB. 1989. The Theory of Structuration. In Held D and Thompson JB (Eds). *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Whittington R. 2015. Giddens, Structuration Theory and Strategy as Practice. In *Cambridge Handbook of Strategy as Practice*. 2nd Edition, pp. 145–164. doi: 10.1017/CCO9781139681032.009.